

Analysis of The Internal Control System And The Clarity Of Budget Goals On The Accountability At The Medan Polrestabes

Analisis Sistem Pengendalian Internal Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Polrestabes Medan

Henny Andriyani Wirananda

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

hennyandriyani@umnaw.ac.id

*Corresponding Author

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the effect of the internal control system on accountability at the Medan Police. To test and analyze the effect of budget target clarity on accountability at Polrestabes Medan. To test and analyze the effect of the internal control system on the clarity of budget targets on accountability at Polrestabes Medan. The analytical technique used in this research is quantitative data analysis. This research data processing using SPSS statistical software. The population in this study was the entire Medan City Police Unit. The number of samples in this study were 143 Medan City Police Units Based on the results of the study, the value of $t_{count} > t_{table}$ ($8,532 > 1,699$) it can be concluded that partially the internal control system has an effect on accountability. The value of $t_{count} > t_{table}$ ($7,830 > 1,699$) it can be concluded that partially the clarity of budget targets has an effect on accountability. Niali $F_{count} > F_{table}$ ($37,545 > 2,99$) it can be concluded that the internal control system and the clarity of budget targets simultaneously affect accountability

Keywords: Internal Control System, Clarity of Budget Goals and Accountability

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas di Polrestabes Medan. Menguji dan menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas di Polrestabes Medan. Menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas di Polrestabes Medan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif. Pengolahan data penelitian ini menggunakan software statistik SPSS. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satpol PP Kota Medan. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 143 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Berdasarkan hasil penelitian nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($8,532 > 1,699$) dapat disimpulkan bahwa secara parsial sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas. Nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($7,830 > 1,699$) maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas. Niali $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($37,545 > 2,99$) maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern dan kejelasan sasaran anggaran secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Intern, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas

1. Pendahuluan

Penerapan anggaran berbasis akuntabilitas diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dalam peraturan ini, disebutkan tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Adanya RKA-SKPD ini berarti telah terpenuhinya kebutuhan tentang anggaran berbasis akuntabilitas dan akuntabilitas. Dimana anggaran berbasis akuntabilitas menuntut adanya output optimal atau pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomi, efisien, dan efektif.

Anggaran Berbasis Akuntabilitas (*Performance Based Budgeting*) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi,

misi dan rencana strategis organisasi. Anggaran dengan pendekatan akuntabilitas menekankan pada konsep *value for money* dan pengawasan atas akuntabilitas output. Pendekatan anggaran akuntabilitas disusun untuk mencoba mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik.

Penyusunan anggaran berbasis akuntabilitas bertujuan untuk dapat meningkatkan efisiensi pengalokasian sumber daya dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh Polrestabes daerah sehingga dengan adanya anggaran berbasis akuntabilitas tersebut diharapkan anggaran dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas manajemen sektor publik.

Penerapan ABK di Indonesia mempunyai tantangan yang tidak ringan karena berubahnya sistem penganggaran. Tantangan yang lebih berat adalah mengubah *mind set* tidak hanya pada lingkungan Polrestabes (eksekutif), tetapi juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif. *Mind set* DPR dalam rangka pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) diharapkan juga berubah menjadi *output base*, tidak lagi *input base*.

Penyusunan Rancangan APBD di Polrestabes kota medan dimulai dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan dituangkan dalam nota kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) antara Kepala daerah dan DPRD, setelah itu dilakukannya Penyusunan dan penyampaian surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD, setelah adanya surat edaran ini setiap SKPD membuat RKA-SKPD atas program dan kegiatan yang diusulkan pada tahun bersangkutan. Kemudian dilakukannya penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan penyampaiannya, setelah itu dilakukannya evaluasi APBD, ketika dalam proses evaluasi ini APBD yang diajukan diterima, langkah selanjutnya adalah penetapan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

Kelemahan sistem pengendalian intern yang ada di Polrestabes Kota Medan adalah kelemahan sistem pencatatan dan pelaporan, kelemahan sistem pelaksanaan anggaran, kelemahan struktur pengendalian intern dimana dukungan Sumber Daya Manusia akuntansi kurang memadai, entitas tidak memiliki SOP pengelolaan keuangan dan barang, Aparat Pengawas Intern Polrestabes (APIP) belum terbentuk atau tidak berfungsi optimal, pemisahan tugas dan fungsi belum memadai.

Polrestabes Kota Medan dalam sering terjadi keterlambatan laporan penyusunan anggaran dalam penyampaian ke Poldasu, (2) Masih lemahnya aparat kepolisian dalam pemahaman UU No. 2 tahun 2002 Pasal 40 yang menyatakan bahwa Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (3) Masih lemahnya skill (ketrampilan) terkait kreativitas laporan keuangan. Masalah akuntabilitas yang belum efektif pada Polrestabes Kota Medan adalah Polrestabes Kota Medan tidak mempublikasikan laporan keuangan serta laporan realisasi pendapatan dan belanja.

2. Tinjauan Pustaka Akuntabilitas

Salim (2007: 16) Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Menurut Mardiasmo (2002 : 20) Pengertian akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan

yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Ausaid (2001:6) Akuntabilitas adalah hal yang sangat penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisien, efektifitas, reliabilitas dan predektibilitas dari administrasi publik. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkret dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik.

Slamet (2004 :8) agar fungsi-fungsi manajemen berjalan sesuai harapan ada empat indikator akuntabilitas yang perlu dikarakteristik yaitu :

1. Kemampuan perencanaan
2. Kemampuan pengorganisasian
3. Kemampuan kepemimpinan
4. kemampuan pengendalian”.

Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi (2001:163), pengendalian intern meliputi “struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”.

Definisi Pengendalian Internal menurut *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission's (COSO)* adalah “suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil lainnya dari sebuah entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinan/jaminan yang wajar berkaitan dengan pencapaian tujuan.

Unsur pokok pengendalian intern menurut Mulyadi (2001:164) adalah :

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan
3. Praktek yang sehat
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya

Kejelasan Sasaran Anggaran

Anthony (2003:18) “kejelasan sasaran anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran mencakup luasnya tujuan anggaran yang dinyatakan secara spesifik dan jelas sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi Polrestabes serta mudah dipahami oleh siapa saja yang bertanggungjawab”.

Suhartono dan Solichin (2006) menyatakan bahwa “penetapan tujuan spesifik akan lebih produktif daripada tidak menetapkan tujuan spesifik yang akan mendorong pegawai untuk melakukan yang terbaik bagi pencapaian tujuan yang dikehendaki”.

Kennis (2011) “Kejelasan sasaran anggaran yaitu menggambarkan tujuan anggaran yang dinyatakan secara jelas dan spesifik, serta dimengerti oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaiannya”. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas.

Nazaruddin (2008) untuk mengukur kejelasan sasaran anggaran adalah menggunakan beberapa indikator sebagai berikut :

- 1) Jelas
Sasaran yang ingin dicapai harus jelas dan digambarkan secara terperinci sehingga semua pihak dapat memahami.
- 2) Spesifik
Sasaran yang ingin dicapai harus dirumuskan secara spesifik dan jelas, tidak menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam. Sasaran tersebut harus memberikan kepada unit kerja dalam merumuskan strategi atau tindakan terbaiknya

- 3) Dapat dipahami
Sasaran yang dibuat secara jelas dan spesifik harus dapat dipahami oleh semua pihak agar tidak terjadi kesalahan dalam pencapaiannya
- 4) *Timeliness*
Menyatakan ketepatan waktu dalam memperoleh informasi mengenai suatu kejadian.

3. Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan asosiatif. Penelitian ini dilakukan pada Polrestabes Kota Medan yang beralamat di Jalan Kampung Durian Medan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Polrestas Kota Medan yang terlibat dalam penyusunan anggaran. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 143 responden. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer melalui teknik pengambilan angket atau pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik dengan menggunakan software SPSS 24 dengan tahapan sebagai berikut: Statistik deskriptif, Uji asumsi klasik, regresi berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi

4. Hasil dan Pembahasan

Statistik Deskriptif

Berdasarkan data terkait dan pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS maka dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
x1	100	38,00	57,00	47,5700	4,06576
x2	100	30,00	54,00	45,2000	4,34846
Y	100	27,00	45,00	36,8800	3,83572
Valid N (listwise)	100				

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel sistem pengendalian intern nilai minum sebesar 38,00, nilai maksimum sebesar 57,00, nilai rata-rata sebesar 47,57. Pada variabel kejelasan sasaran anggaran nilai minimum sebesar 30,00, maksimum sebesar 54,00 dan nilai rata-rata sebesar 45,20. Pada variabel akuntabilitas nilai minum sebesar 27,00, maksimum sebesar 45,00 dan nilai rata-rata 36,88.

Uji Normalitas

Tabel 2. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		x1	x2	y
N		100	100	100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	47,5700	45,2000	36,8800
	Std. Deviation	4,06576	4,34846	3,83572
Most Extreme Differences	Absolute	,112	,103	,132
	Positive	,059	,060	,075
	Negative	-,112	-,103	-,132
Test Statistic		,112	,103	,132
Asymp. Sig. (2-tailed)		,348 ^c	,108 ^c	,178 ^c

a Test distribution is Normal.

b Calculated from data.

Dari hasil pengolahan data tersebut, besarnya nilai *Kolmogorov-Smirnov* adalah sistem pengendalian intern (X1) 0.348, kejelasan sasaran anggaran (X2) 0.108 dan akuntabilitas

(Y) 0,178 maka disimpulkan data terdistribusi secara normal karena $p > 0,05$. Data yang terdistribusi secara normal tersebut.

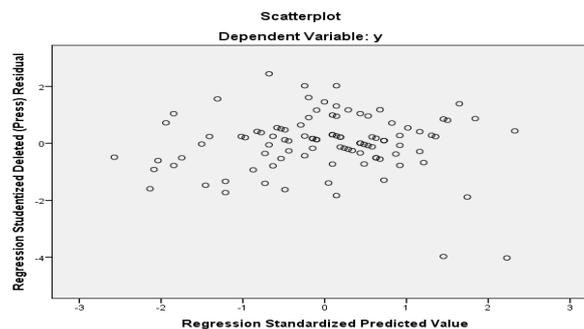
Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1		
	(Constant)	
	x1	,999 1,001
	x2	,999 1,001

Berdasarkan pada tabel 4.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolonearitas antara variabel independen yang diindikasikan dari nilai *tolerance* setiap variabel lebih besar dari 0,1.

Uji Heterokedastisitas



Gambar 1. Uji Heterokedastisitas

Regresi Berganda

Tabel 4. Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1		
	(Constant)	2,103 4,673
	x1	,614 ,072
	x2	,123 ,067

Berdasarkan tabel diatas didapatkan persamaan regresi sebagai berikut

$$Y = 2,103 + 0,614X_1 + 0,123X_2$$

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) konstanta sebesar 2,103 menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel independen ($X_1 = 0$, $X_2 = 0$), maka nilai akuntabilitas sebesar 0,213.
- 2) β_1 sebesar 0,614 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 0,614 sebesar 100% akan diikuti oleh peningkatan akuntabilitas sebesar 0,614% dengan asumsi variabel lain tetap.
- 3) β_2 sebesar 0,123 menunjukkan bahwa setiap kenaikan kejelasan sasaran anggaran sebesar 100% akan diikuti oleh kenaikan akuntabilitas sebesar 12,3% dengan asumsi variabel lain tetap.

Uji t

Tabel 5. Uji t

Model		t	Sig.
1	(Constant)	,450	,654
	x1	8,532	,000
	x2	7,830	,000

Dari hasil penelitian ini variaebel independen yang terdiri dari :

1. Sistem pengendalian intern

Hipotesis : sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas

$t_{hitung} > t_{tabel}$ (8,532 > 1,699)

Maka H_0 ditolak sehingga sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas

2. Kejelasan sasaran anggaran

Hipotesis : kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas

$t_{hitung} > t_{tabel}$ (7,830 > 1,699)

Maka H_0 ditolak sehingga kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas

Uji F

Untuk melihat pengaruh sistem pengendalian intern, evaluasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas secara simultan dapat dihitung dengan menggunakan *F test*. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS 18, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 6. Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	635,557	2	317,779	37,545	,000 ^b
	Residual	821,003	97	8,464		
	Total	1456,560	99			

a. Dependent Variable: y

b. Predictors: (Constant), x2, x1

Dari uji ANOVA atau *F test*, diperoleh F_{hitung} sebesar 37,545, sedangkan F_{tabel} sebesar 2,99. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern, dan kejelasan sasaran anggaran secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ (37,545 > 2,99).

Koefisien Determinasi

Tabel 7. R Square

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,661 ^a	,436	,425	2,90929

Adjusted R Square adalah berfungsi untuk mengukur seberapa besar tingkat keyakinan penambahan variabel independen yang tepat untuk menambah daya prediksi model. Dari hasil penelitian nilai adjust R Square sebesar 0,425 berarti 42,5% sistem pengendalian intern, kejelasan sasaran anggaran mempengaruhi akuntabilitas sementara sisanya 57,8% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak masuk dalam model penelitian ini.

Pengaruh Sistem pengendalian intern Terhadap Akuntabilitas

Dari tabel regresi dapat dilihat besarnya t_{hitung} untuk variabel sistem pengendalian intern sebesar 8,532, sedangkan t_{tabel} adalah 1,699, sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($8,532 > 1,699$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas.

Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa sistem pengendalian intern secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas. Variabel sistem pengendalian intern responden banyak yang menjawab setuju yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern yang ada di Polrestasbes sudah berjalan dengan dan dapat mewujudkan akuntabilitas.

Variabel sistem pengendalian intern yang diukur dengan penggunaan surat tanda setoran, pengecekan secara acak setiap bagian perencanaan, pencatatan transaksi, tanggung jawab, pemisahan fungsi, pengendalian fisik, pengendalian fisik, pemantauan dan evaluasi, responden banyak yang menjawab setuju dengan nilai rata-rata 62% yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern yang ada di Polrestasbes sudah berjalan dengan dan dapat mewujudkan akuntabilitas.

Dari hasil penelitian menunjukkan sistem pengendalian intern sudah berjalan dengan dan sudah sesuai dengan teori Midjan dan Susanto (2001:58) pengendalian internal meliputi : Struktur organisasi dan segala cara serta tindakan dalam suatu perusahaan yang saling terkoordinasi dengan tujuan untuk mengamankan harta kekayaan perusahaan, menguji ketelitian dan kebenaran data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasi, serta mendorong ketaatan terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah digariskan oleh pemimpin perusahaan.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Muda (2005) dengan judul Pengaruh Sistem pengendalian intern terhadap Akuntabilitas Polrestabes pada Sekretariat Kota Kotamadya Jakarta Selatan menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh sistem pengendalian intern terhadap Akuntabilitas Kinerja Polrestabes pada Sekretariat Kota Kotamadya Jakarta Selatan yang positif dan signifikan.

Herawati (2011) melakukan penelitian dengan judul Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Polrestabes Daerah Kota Jambi, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas instansi Polrestabes Di Kota Jambi mempunyai pengaruh positif signifikan. Secara parsial yang memiliki pengaruh negatif yaitu variabel variabel X1 (Kejelasan sasaran anggaran) dan X2 (Pengendalian akuntansi), variabel yang mempunyai pengaruh positif yaitu variabel sistem pelaporan (X3).

Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas Polrestabes yang terukur melalui tahapan siklus anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu, dimulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan / pertanggungjawaban, dan evaluasi sehingga akan tercipta akuntabilitas Polrestabes yang lebih baik.

Dengan adanya sistem pengendalian intern dapat memungkinkan manajemen puncak untuk memahami masalah yang dihadapi oleh karyawan dan karyawan juga lebih dapat memahami kesulitan yang dihadapi oleh manajemen puncak. Sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas para karyawan untuk mencapai tujuan anggaran.

Dalam rangka penerapan otonomi daerah dan desentralisasi, penganggaran berbasis kinerja diterapkan untuk mendukung terciptanya akuntabilitas kinerja instansi Polrestabes daerah. Keterkaitan antara penganggaran berbasis kinerja dengan akuntabilitas kinerja instansi Polrestabes daerah bahwa upaya untuk menciptakan pengelolaan anggaran berbasis akuntabilitas diharapkan akan mampu memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat, yaitu terbentuknya semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan Polrestabes pada umumnya dan proses

pengelolaan keuangan daerah pada khususnya.

Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas Polrestabes yang terukur melalui tahapan siklus anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu, dimulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan / pertanggungjawaban, dan evaluasi sehingga akan tercipta akuntabilitas Polrestabes yang lebih baik.

Penilaian akuntabilitas anggaran belanja merupakan sasaran yang diharapkan sebagai fungsi belanja, Standar pelayanan diharapkan dan diperkirakan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan, bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal/pembangunan

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas

Kejelasan sasaran anggaran memiliki t_{hitung} sebesar 7,830 dengan nilai signifikan 0,000, sedangkan t_{tabel} adalah 1,699, sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($7,830 > 1,699$), dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak maka kejelasan sasaran anggaran secara individual mempengaruhi akuntabilitas.

Dari hasil penelitian dapat dilihat kejelasan sasaran anggaran secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas. Variabel kejelasan sasaran anggaran responden banyak yang menjawab setuju, hal ini menunjukkan kejelasan sasaran anggaran yang dilakukan berjalan dengan baik sehingga responden menjawab setuju.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Abdullah (2005) menyatakan bahwa arah dan kebijakan umum APBD pada dasarnya memuat informasi mengenai tujuan (goals) dan sasaran (objectives) yang akan dicapai oleh daerah yang bersangkutan dalam tahun anggaran tertentu. Kedua komponen arah dan kebijakan umum APBD ini merupakan jawaban atas "*where do we want to be*" dalam proses perencanaan strategis. Tujuan merupakan arah (*direction*) yang akan menunjukkan tujuan (*destination*) daerah dimasa yang akan datang, sedangkan sasaran menunjukkan batas-batas (*milestones*) sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nina (2009) meneliti Pengaruh Implementasi Penganggaran Berbasis Akuntabilitas terhadap Akuntabilitas Instansi Polrestabes Daerah, dengan variabel independen Penganggaran Berbasis Akuntabilitas dan variabel dependen Akuntabilitas Instansi Polrestabes dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi penganggaran berbasis akuntabilitas berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap akuntabilitas instansi Polrestabes daerah.

Kejelasan sasaran anggaran akan membantu pegawai untuk mencapai akuntabilitas yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran maka tingkat akuntabilitas dapat tercapai.

Penilaian akuntabilitas anggaran belanja merupakan sasaran yang diharapkan sebagai fungsi belanja, Standar pelayanan diharapkan dan diperkirakan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan, bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal/pembangunan.

Kejelasan sasaran anggaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran maka tingkat kinerja dapat tercapai. Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas ini, maka adanya kemudahan dalam mempertanggung jawabkan berhasil atau gagalnya pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidakjelasan anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran bingung, tidak tenang serta tidak puas dalam bekerja. Hal ini akan menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan.

Pengaruh Sistem pengendalian intern dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap

Akuntabilitas

Dari uji ANOVA atau *F test*, diperoleh $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($37,545 > 2,99$). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern, dan kejelasan sasaran anggaran secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas.

Dari hasil penelitian dengan menggunakan uji F sistem pengendalian intern dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas Penyusunan anggaran berbasis akuntabilitas bertujuan untuk dapat meningkatkan efisiensi pengalokasian sumber daya dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh Polrestabes daerah sehingga dengan adanya anggaran berbasis akuntabilitas tersebut diharapkan anggaran dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas manajemen sektor publik. Selain itu, anggaran berbasis akuntabilitas memfokuskan pemanfaatan anggaran untuk perbaikan akuntabilitas organisasi yang berpedoman pada prinsip *value for money*.

Variabel akuntabilitas yang diukur dengan kejujuran, proses, program, dan kebijakan responden banyak yang menjawab setuju, hal ini menunjukkan akuntabilitas yang dilakukan Polrestabes sudah baik sehingga responden menjawab setuju. Visi dan misi program perlu ditetapkan sesuai rencana strategis organisasi hal ini menunjukkan di kantor Polrestabes Kota Medan dalam penyusunan anggaran dan penggunaan anggaran disusun sesuai dengan visi misi Polrestabes agar terciptanya akuntabilitas Polrestabes.

Penerapan ABK di Indonesia mempunyai tantangan yang tidak ringan karena berubahnya sistem penganggaran. Tantangan yang lebih berat adalah mengubah *mind set* tidak hanya pada lingkungan Polrestabes (eksekutif), tetapi juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif. *Mind set* DPR dalam rangka pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) diharapkan juga berubah menjadi *output base*, tidak lagi *input base*.

Penyusunan Rancangan APBD di Polrestabes Kota Medan dimulai dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan dituangkan dalam nota kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) antara Kepala daerah dan DPRD, setelah itu dilakukannya Penyusunan dan penyampaian surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD, setelah adanya surat edaran ini setiap SKPD membuat RKA-SKPD atas program dan kegiatan yang diusulkan pada tahun bersangkutan. Kemudian dilakukannya penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan penyampaiannya, setelah itu dilakukannya evaluasi APBD, ketika dalam proses evaluasi ini APBD yang diajukan diterima, langkah selanjutnya adalah penetapan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

Slamet (2005:6) menyatakan: Tujuan utama akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas setiap instansi Polrestabes sebagai salah satu syarat untuk terciptanya Polrestabes yang baik dan terpercaya. Penyelenggara Polrestabes harus memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada publik.

Mayuraa (2014) Hasil penelitian bahwa kejelasan tujuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas aparat Polrestabes Daerah Kabupaten Gorontalo sesuai dengan kejelasan atas percepatan pelaksanaan program kegiatan, pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan APBD.

5. Penutup Kesimpulan

Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas. Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas Polrestabes yang terukur melalui tahapan siklus anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu, dimulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan / pertanggungjawaban,

dan evaluasi sehingga akan tercipta akuntabilitas Polrestabes yang lebih baik. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas. Kejelasan sasaran anggaran akan membantu pegawai untuk mencapai akuntabilitas yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran maka tingkat akuntabilitas dapat tercapai. Sistem pengendalian intern dan kejelasan sasaran anggaran secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas. Tujuan utama akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas setiap instansi Polrestabes sebagai salah satu syarat untuk terciptanya Polrestabes yang baik dan terpercaya. Penyelenggara Polrestabes harus memahami bahwa mereka harus bertanggung jawabkan hasil kerja kepada publik.

Saran

Dalam membuat perencanaan anggaran polrestabes kota Medan sebaiknya lebih mengutamakan membuat program atau kegiatan yang lebih bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam implementasi atau pelaksanaan anggaran polrestabes kota Medan sebaiknya lebih memonitoring pelaksanaan program kegiatan/kegiatan seberapa jauh pelaksanaannya dan memperbaiki sistem keuangan daerah dalam hal pencatatan penggunaan anggaran.

Daftar Pustaka

- Abdul Latif. (2014). Pengaruh Sistem pengendalian intern, Kejelasan Tujuan Dan Karakteristik Terhadap Akuntabilitas Aparat Polrestabes Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Al-Buhuts*, 10(1).
- Agus Dwiyanto. (2005). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Anthony, R. N. & Govindarajan. (2003) *Sistem Pengendalian Manajemen*. Penerbit Salemba Empat Edisi:1 Buku 2.
- Apandi Nasehatun. (2004). *Budget and Control*. Jakarta : Grasindo.
- Azuar Juliandi & Irfan. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Bisnis*. Bandung : Citapustaka Media Perintis.
- Badan Pemeriksa Keuangan (2009) *Rancangan Laporan Akuntabilitas Polrestabes*. Jakarta: BPK
- Bangun, Andrias, (2009). Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial SKPD Dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Polrestabes Deli Serdang). *Thesis*. UNSUT Medan.
- Bastian, Indra. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Beny Arifin W. (2012) Pengaruh Partisipasri Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntantansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Instansi Polrestabes Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*.
- Fladimir Edwin Mbon (2014) *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Akuntabilitas Aparat Polrestabes Daerah Yogyakarta*
- Ginting, Ahyari. (2009). *Anggaran Perusahaan*. Yogyakarta. BPFE.
- Hansen & Mowen. (2004). *Manajemen Biaya, Edisi Bahasa Indonesia*. Buku Kedua. Jakarta: Salemba Empat
- Harjanti. (2009). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Polrestabes (Studi Kasus Pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja). *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*
- Herawaty. (2011). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Polrestabes Daerah Kota Jambi.

- Indriya, Kartika. (2013). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Polrestabes (SPIP) Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pada Polrestabes Kabupaten Wilayah Jawa Barat. *Jurnal Penelitian Universitas Pendidikan Indonesia*.
- Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas
- Ismail Solihin. (2009). *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*. Jakarta : Salemba Empat
- Kemendiknas. (2010). *Pembinaan Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Pertama* . Jakarta
- Kennis,I. (2011). Effect of Budgetary Goal Characteristic on Managerial Attitudes and Performance. *The Accounting Review*: 707-721
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Mayura. (2014). *Pengaruh Kejelasan Dan Tujuan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Aparat Polrestabes Gorontalo*
- Meria Solina. (2015). *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Struktur Desentralisasi Terhadap Akuntabilitas Pada Skpd Kota Tanjungpinang*
- Muhammad. Yusuf. (2015). *Prosedur Penyusunan Anggaran Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara*
- Nafarin,M. (2007). *Penganggaran Perusahaan*.Jakarta:Salemba Empat
- Nazaruddin. (2008). *Penyusunan Anggaran Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Nina, Widawati. (2009). Pengaruh Implementasi Penganggaran Berbasis Akuntabilitas terhadap Akuntabilitas Instansi Polrestabes Daerah Pada SKPD Kabupaten Priangan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*
- Noviana. (2015). *Prosedur Penyusunan Anggaran Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara*
- Nunnally, J.C., (1978). *Pshycometric Theory*, New York: McGraw-Hill.
- Nurhalimah. (2013). *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Aparatur Perangkat Daerah di Polrestabes Aceh*. Aceh Darussalam.
- Pratiwy, A. (2013). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Desentralisasi terhadap Kinerja Polrestabes Daerah*. Padang.
- Reni Yulianti (2008) Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kesulitan Sasaran Anggaran Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Instansi Polrestabes. *Jurnal Akuntansi*